**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

 Pada bab II ini menjelaskan tentang landasan teoritis, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. Landasan teori memaparkan tentang teori-teori yang memiliki relevansi terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Selain penjelasan teori, beberapa penjelasan tentang penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan peneliti juga akan dibahas dalam bab ini.

 Kerangka pemikiran mengkaji alur logika dari setiap variabel penelitian. Penjelasan dalam kerangka pemikiran tersebut yang akan digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan atau dugaan sementara dari penelitian yang disebut hipotesis.

**A. Landasan Teoritis**

 **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Ilmu pengetahuan telah mengubah peradaban sebuah teori klasik menjadi teori manajemen modern. Kontribusi ilmu manajemen modern menjadi babak baru lahirnya teori agensi. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976). Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu: manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*). Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance* (Hamdani, 2016:30). Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Dimungkinkan pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (conflict interest). Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG), tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham.

Oleh karena adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil jika dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh para pemegang saham, sehingga manajer cenderung untuk mencari keuntungan sendiri (moral hazard). Hal ini dilakukan karena manajer menganggap ia memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dan itu tidak dimiliki oleh prinsipal (*asymmetric information*).

Perilaku moral hazard yang dilakukan oleh agent mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan lebih banyak yang disebut agency cost. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka akan semakin banyak *agency cost* yang terjadi. Pemilik semakin tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan. Yang menjadi pemicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal.

Menurut Hamdani (2016:31), biaya keagenan (*agency cost*) dibagi menjadi: *monitoring cost, bonding cost*, dan residual *loss*. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost* yang terjadi. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan ertindak untuk kepentingan prinsipal. Sedangkan residual *loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

**2. Good Corporate Governance**

*Corporate governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (prinsipal / investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (agent) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. *Forum for Corporate Governance in* Indonesia / FCGI mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nilai tambah yang dimaksud yaitu memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat (FCGI), yaitu:

(1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

(2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value.*

(3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

(4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder’s values* dan dividen.

**3. Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

Tujuan *good corporate* *governance* pada intinya yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam praktiknya *corporate governance* berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial, dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip *corporate governance*, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Menurut Zarkasyi (2008:38), setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

 **a. Transparansi (*Transparency*)**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pokok pelaksanaannya yaitu meliputi:

(1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

(2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memilki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

(3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

(4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

 **b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pokok pelaksanaannya yaitu meliputi:

(1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.

(2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

(3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

(4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

(5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

**c. Responsibilitas (*Responsibility*)**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate* *citizen*. Pokok pelaksanaannya yaitu meliputi:

(1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).

(2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

**d. Independensi (*Independency*)**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pokok pelaksanaannya yaitu meliputi:

(1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

(2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dana tau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujudnya sistem pengendalian internal yang efektif.

**e. Kesetaraan dan Kewajaran *(Fairness)***

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Pokok pelaksanaannya yaitu meliputi:

(1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

(2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

(3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

 **4. Mekanisme Good Corporate Governance**

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Iskandar dan Chamlou (2000) dalam Widhianningrum & Nik Amah (2012) menyebutkan bahwa mekanisme pengawasan dalam corporate governance dibagi menjadi dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanism*. Internal mechanism adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan mengunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, dan pertemuan dengan *board of directors*. *External mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan GCG merupakan suatu prosedur yang dapat mengendalikan perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan *stakeholders* secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini, mekanisme GCG akan diproksikan dengan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, struktur kepemilikan institusional, frekuensi rapat dewan komisaris, dan frekuensi rapat komite audit.

 **a. Dewan Komisaris**

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris merupakan wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Dewan komisaris bertanggung jawab menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern (Widagdo & Anis Chariri, 2014).

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris di Indonesia bervariasi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan corporate governance sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 yang menjelaskan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada direksi. Oleh karena itu, dewan komisaris berpengaruh besar dalam penyelenggaraan corporate governance oleh perusahaan.

**b. Komite Audit**

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari diluar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal, audit internal, dan pengendalian internal.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/ 2015 pasal (1) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dapat disimpulkan bahwa Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan internal, memastikan keefektivitasan auditor eksternal dan internal, serta memperkuat independensi auditor. Semakin banyaknya anggota komite audit akan meningkatkan kinerja komite audit tersebut. Hal ini akan mengakibatkan fungsi pengawasan semakin meningkat, sehingga kualitas pelaporan yang dilakukan oleh manajemen akan terjamin (Nabila & Daljono, 2013).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 10, dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

(1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

(2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.

(3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

(4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

(5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

(6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

(7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

(8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

(9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

 Otoritas Komite Audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris kecuali hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, misal: mengevaluasi dan menentukan kompetensi Auditor Eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

 Menurut Zarkasyi (2008) dalam menjalankan perannya, Komite Audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak katas akses tersebut, akan tidak mungkin Komite Audit dapat menjalankan perannya dengan efektif.

 Sejalan dengan arahan untuk menjalankan fungsi komite audit secara efektif, maka ukuran sukses komite audit yang berhubungan dengan kegiatan organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pelayanan, kualitas, dan biaya. Oleh karena itu, komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah didalam lingkup tanggung jawabnya yang mempunyai tugas membantu dewan komisaris. Komite Audit sebagai perwujudan dari implementasi GCG berkaitan dengan peran *Corporate Governance* yang tugasnya sebagai berikut:

1. Mengawasi proses penyusunan *Corporate Governance*.
2. Memastikan bahwa manajemen senior secara aktif mensosialisasikan budaya *Corporate Governance*.
3. Memonitor bahwa *Code of Conduct* telah dilaksanakan secara konsekuen.
4. Memantau bahwa perusahaan mematuhi Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
5. Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan *Corporate Governance* dan temuan lainnya.

 Oleh karena itu peran Komite Audit erat kaitannya dengan GCG dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite Audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena Komite Audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan.

**c. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan *investment banking* (I Guna & Herawaty, 2010). Investor institusional dianggap sophisticated investors yang tidak mudah “dibodohi” oleh tindakan manajer. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Lestari, 2017).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* para manajer (Lestari, 2017).

 **d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Rapat dewan komisaris merupakan hal penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antara anggota-anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Zahra et al. (2016) efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan dewan biasanya digunakan untuk mendiskusikan dan pertukaran pemikiran antar dewan dalam mengawasi manajemen. Aktivitas *board* merupakan dimensi penting dan bahwa frekuensi rapat yang dilakukan memiliki hubungan dengan kinerja operasi perusahaan.

**e. Frekuensi Rapat Komite Audit**

Rapat komite audit yang secara rutin dilakukan akan meningkatkan fungsi monitoring terhadap manajemen (Nabila & Daljono, 2013). Dengan adanya pengawasan yang semakin ketat maka manajemen akan kehilangan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan curang terkait dengan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2015) mensyaratkan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Menon & Williams (1994) dalam Pamudji & Aprillya Trihartati (2010), berpendapat bahwa komite audit yang tidak aktif tidak memungkinkan untuk memonitori manajemen secara efektif.

 **5. Kinerja Perusahaan**

a. Pengertian Kinerja Perusahaan

 Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode waktu tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati (Zarkasyi, 2008).

 Menurut Purwadarminta (2007), bahwa kinerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasi kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Guna mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan maka dilakukan serangkaian tindakan evaluasi yang pada intinya adalah penilaian atas hasil usaha yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Penilaian kinerja juga mengandung tugas-tugas untuk mengukur berbagai aktifitas tingkat organisasi sehingga menghasilkan informasi umpan balik untuk melakukan perbaikan organisasi. Perbaikan organisasi mengandung makna perbaikan manajemen organisasi yang meliputi perbaikan perencanaan, perbaikan proses, dan perbaikan evaluasi. Proses ini harus dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan agar faktor strategik (keunggulan bersaing) dapat tercapai.

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian kinerja dilakukan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Dengan penilaian kinerja juga maka akan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, manajemen, dan pemerintah.

Rasio keuangan merupakan alat utama untuk menganalisa keuangan. Ada dua kelompok yang menganggap rasio keuangan berguna. Pertama, terdiri dari manajer yang menggunakannya untuk mengukur dan melacak kinerja perusahaan setiap waktu. Kedua, pengguna rasio keuangan mencakup para analisis atau investor yang merupakan pihak eksternal perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan:

 (1) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, maupun laba bagi pemodal sendiri. Rasio profitabilitas antara lain: Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), Operating Return On Assets (OPROA), Return On Assets (ROA), Earnings Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), Operating Ratio (OR).

 (2) Rasio Solvabilitas

 Finansial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%.

(3) Rasio Aktivitas

Rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, dengan membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

(4) Rasio Likuiditas

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.

(5) Rasio Pasar

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham

 b. *Earnings Per Share* (EPS)

Menurut Baridwan (2004:443) dalam Priatinah & Prabandaru Adhe Kusuma (2012) yang dimaksud dengan *Earning Per Share* (EPS) atau laba per saham adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk setiap lembar saham yang beredar. Laba per lembar saham dapat memberikan informasi bagi investor untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan. Investor dalam mengambil keputusan banyak memperhatikan pertumbuhan *Earnings Per Share*. Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi EPS maka akan semakin mahal suatu saham dan sebaliknya, karena EPS merupakan salah satu bentuk rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang memberikan penjelasan, deskripsi, serta uraian mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti akan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Judul Penelitian | Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 |
| Nama Peneliti | Rizqi Waluya Ningsih, Nur Diana, dan Junaidi |
| Tahun Penelitian | 2019 |
| Variabel Penelitian | Independen: Komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusionalDependen: Kinerja Perusahaan (ROE) |
| Metode Penelitian | Statistik deskriptif, uji f, uji r2, dan uji t |
| Hasil Penelitian | 1. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.2. Dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.3. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.4. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.5. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.  |
| 2 | Judul Penelitian | Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015) |
| Nama Peneliti | Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen: Proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusionalDependen: ROE dan ROA |
| Metode Penelitian | Analisis regresi linear bergada, koefisien regresi, uji hipotesis |
| Hasil Penelitian | 1. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROE dan ROA.2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap ROE dan ROA.3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROE dan ROA.4. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ROE dan ROA. |
| 3 | Judul Penelitian | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan |
| Nama Peneliti | Rowina Kartika Putri dan Dul Muid |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen: Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris.Dependen: ROA dan ROE |
| Metode Penelitian | Analisis statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi, dan pengujian hipotesis |
| Hasil Penelitian | 1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.2. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.3. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. |
| 4 | Judul Penelitian | Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan |
| Nama Peneliti | Astri Aprianingsih |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen: Dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan.Dependen: Kinerja Perusahaan (ROA) |
| Metode Penelitian | Analisis regresi linear berganda, Uji hipotesis, uji f, dan uji t |
| Hasil Penelitian | 1. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.2. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan.3. Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan.4. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.5. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.6. Ukuran perusahaan berpegaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. |
| 5 | Judul Penelitian | Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Profitabilitas |
| Nama Peneliti | Fajrina Narjees Zahra, Dudi Pratomo, dan Vaya Juliana Dillak |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen: Komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris.Dependen: ROA |
| Metode Penelitian | Uji statistik deskriptif, estimasi regresi data panel, koefisien determinasi, uji f, dan uji t |
| Hasil Penelitian | 1. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROA.2. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ROA.3. Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ROA. |
| 6 | Judul Penelitian | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan |
| Nama Peneliti | Benedictus Dimas Widyatama dan Agustinus Santosa Adi Wibowo |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Independen: Dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, jumlah rapat komite audit, dan jumlah rapat dewan komisaris.Dependen: Kinerja perusahaan (EPS). |
| Metode Penelitian | Analisis regresi linear berganda, statistik deskriptif, asumsi klasik, uji hipotesis. |
| Hasil Penelitian | 1. Dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap EPS.2. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap EPS.3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap EPS.4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap EPS.5. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap EPS.6. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap EPS. |
| 7 | Judul Penelitian | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan |
| Nama Peneliti | Daniel Felimanto Hartono dan Yeterina Widi Nugrahanti |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Variabel Penelitian | Independen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit.Dependen: Kinerja keuangan perbankan (ROE) |
| Metode Penelitian | Regresi linear berganda, asumsi klasik, statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis |
| Hasil Penelitian | 1. Kepemilkan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.4. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan.5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. |
| 8 | Judul Penelitian | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan |
| Nama Peneliti | Dominikus Octavianto Kresno Widagdo dan Anis Chariri |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Variabel Penelitian | Independen: Dewan komisaris, independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit.Dependen: Kinerja Perusahaan (EPS). |
| Metode Penelitian | Analisis regresi linear berganda, statistik deskriptif, uji hipotesis. |
| Hasil Penelitian |  1. Dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan (EPS).2. Independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (EPS). |

**C. Kerangka Pemikiran**

 **1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan.**

Mengacu pada teori keagenan yang merupakan hubungan kontrak antara manajer (agent) dan investor (prinsipal), dimana pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan. Dalam hal ini dimungkinkan pengelola perusahaan tidak bertindak atas kepentingan pemilik, melainkan akan bertindak sebagai kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, adanya Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (Hamdani 2016:82). Fungsi pengawasan dewan komisaris adalah dengan mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris, maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasihat dan masukan untuk dewan direksi pun menjadi lebih banyak. Sehingga kinerja dari manajemen menjadi lebih baik dan berimbas pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Widagdo & Anis Chariri (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Widyatama & Agustinus Santosa (2015) juga menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

 **2. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan.**

Menurut (Zarkasyi, 2008) Komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain di bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite audit diharapkan dapat memberikan rekomendasi akuntan publik, menilai hal-hal yang menyangkut penugasan akuntan publik, menilai kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan termasuk laporan tahunan, laporan auditor dan *management letter*. Komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam lingkup tanggungjawabnya yang mempunyai tugas membantu dewan komisaris. Oleh karena itu, peran komite audit erat kaitannya dengan GCG dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena komite audit juga berperan dalam mengevaluasi laporan keuangan.

Pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan GCG. Dengan adanya komite audit akan memberikan pengawasan terhadap suatu manajemen perusahaan sehingga dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih & Amanita Novi (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muntiah (2015) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

 **3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan.**

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* para manajer. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Lestari, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Nila Firdausi (2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Yeterina Widi (2014) bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

 **4. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan.**

Teori keagenan menjelaskan bahwa *agency problem* terjadi karena perbedaan kepentingan antara agent dan prinsipal. Untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan menerapkan mekanisme *corporate governance*. Dalam penerapan *corporate governance*, Dewan Komisaris yang bertanggung jawab mengawasi direksi pada perusahaan.

Selama menjalankan tugasnya untuk mengawasi manajemen, Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh direksi. Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin baik dan semakin membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan secara tepat. Dengan demikian kinerja perusahaan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Dul Muid (2017) mendapatkan hasil bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Didukung oleh penelitian Widyatama & Agustinus Santosa (2015) mendapatkan hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

 **5. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan.**

Untuk menghindari terjadinya *agency problem*, salah satu cara yang diterapkan perusahaan adalah penerapan mekanisme *corporate governance*, yang salah satu elemennya adalah komite audit. Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit perlu melakukan rapat-rapat yang berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi anggotanya dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaporan kinerja manajemen. Menurut DeZoort (2002) dalam Widagdo & Anis Chariri (2014), jumlah rapat komite audit mengacu pada kesediaan anggota komite audit untuk bekerja sama untuk mempersiapkan, mengajukan pertanyaan, dan mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak lain yang relevan. Dalam kaitannya dengan GCG, maka semakin sering komite audit melakukan rapat, diharapkan koordinasi antar anggota komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik maka kinerja manajemen dapat ditingkatkan sehingga kinerja perusahaan pun meningkat.

**Gambar 2 1
Kerangka Pemikiran**

Ukuran Dewan Komisaris

+

+

Ukuran Komite Audit

+

Kinerja Perusahaan (EPS)

+

Kepemilikan Institusional

+

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat Komite Audit

**D. Hipotesis**

 Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

 H1 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

 H2 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

 H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

 H4 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

 H5 : Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.